



EDITORIAL:
Think Globally, Act Locally

Terdapat sebuah ungkapan sederhana namun kaya makna yang muncul di tengah arus globalisasi yaitu “*Think globally and act locally*” (berpikir secara global dan bertindak secara lokal). Ungkapan ini kemudian disusul oleh datangnya ungkapan yang senada yaitu “*Think locally and act globally*” (berpikir secara lokal dan bertindak secara global). Ungkapan “*Think globally and act locally*” pertama kali muncul dalam konteks inklusivitas lingkungan dari para pakar multidisipliner, di antaranya: David Brower, Patrick Geedes, René Dubos, Frank Feather, yang prihatin akan permasalahan lingkungan global yang semakin mengancam kehidupan bumi dan umat manusia. Para pakar ini kemudian mendesak setiap orang maupun negara untuk hirau, ikut memikirkan dan bertindak dalam menjaga kesehatan seluruh planet di tempatnya masing-masing. Dengan “*Think globally and act locally*” juga mendorong visi di seluruh dunia tentang apa yang dilakukan, tidak dilakukan, dan harus dilakukan untuk mengurangi secara adil beban dan penyebab permasalahan yang buruk bagi dunia. Sementara bertindak secara lokal adalah seruan kepada orang-orang atau pihak-pihak untuk menjadi peserta aktif, bukan lagi subjek pasif, dari apa yang dilakukan untuk dan oleh mereka.

Ungkapan “*Think globally and act locally*” “ini juga dikenal dan digunakan pada ragam konteks lainnya, termasuk perencanaan, pendidikan, bisnis, kesehatan dan matematika. Dalam konteks Hubungan Internasional, khususnya mengenai globalisasi

dan lokalisasi, ungkapan “*Think globally and act locally*” kerap dihadirkan untuk mengingatkan bahwa masalah global pada era masa kini tak dapat diingkari terkait dengan masalah lokal, atau masalah lokal tak lepas dari masalah global yang secara lamban maupun seketika saling memengaruhi dan berdampak secara internasional maupun domestik. Oleh karena itu, bagi setiap pemikiran maupun tindakan dalam permasalahan apapun yang berskala global maupun lokal, pertimbangan akan efek *spill over* dan timbal baliknya diperlukan. Permasalahan global-lokal serius, dari yang bersifat ringan sampai yang terberat, di antaranya adalah: kurangnya peluang ekonomi dan pekerjaan; keselamatan/keamanan/kesejahteraan; kurangnya pendidikan; keamanan pangan dan air; akuntabilitas dan transparansi/korupsi pemerintah; konflik agama; kemiskinan; kesetaraan gender (pendapatan, diskriminasi); konflik/perang skala besar; dan perubahan iklim/kerusakan alam. Solusi bagi permasalahan global-lokal umumnya membutuhkan konsensus, komitmen dan kerja sama antarnegara dalam skala bilateral dan multilateral, regional dan global.

Pada tataran global, meskipun ada organisasi internasional negara-negara di dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan segala program kesepakatan untuk mengatasi permasalahan global bersama antarnegara anggota, namun dengan tidak adanya otoritas sentral untuk menegakkan kesepakatan, negara-negara pada tataran nasional harus menemukan cara untuk menjaga diri mereka sendiri berada di jalur yang disepakati. Cara setiap negara tersebut meliputi apa yang kemudian memunculkan ungkapan “*Think locally and act globally*”, yaitu segala pemikiran atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara dan bagaimana implementasinya kemudian, selain ditujukan secara sengaja atau tidak sengaja untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya sendiri namun dalam prosesnya dapat sejalan atau tidak bertentangan dengan kepentingan global atau bahkan mendukungnya.

Di sisi lain, berpikir secara global dapat mengundang komunitas pada tataran nasional untuk bertindak secara lokal, meskipun prioritas tetap ditetapkan di tempat lain, dengan sedikit penyimpangan dari agenda yang ditetapkan. Berpikir secara global dalam hal ini menyiratkan mendengarkan aspirasi masyarakat, mendokumentasikan kebutuhan mereka, mempromosikan partisipasi masyarakat, dan mendukung mereka dalam mencari solusi lokal yang tepat. Dalam hal ini negara berperan dalam memfasilitasi kelancaran dan keberhasilannya. Berdasarkan hal demikian, seperti,

pemikiran global tidak selalunya tak tertandingi: masyarakat sipil pada saat ini memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam menegosiasikan prioritas permasalahan global, dan mereka menjadi lawan bicara yang tak terhindarkan dalam penentuan prioritas dan memberikan kesaksian yang berharga dari penggunaan dan penyalahgunaan sumber-sumber daya. Oleh karena itu, pemikiran lokal dapat dan harus menginspirasi kebijakan global melalui advokasi, tekanan sosial dan proses demokrasi. Tindakan global harus dipandu oleh tuntutan lokal dan membangun kemampuan lokal. Dengan begitu “*Think locally and act globally*” mungkin menjadi ungkapan permasalahan masyarakat lokal yang dimensi global di masa depan.

Dalam penerbitan Jurnal *Intermestic* Volume 3 Nomor 2 pada bulan Mei Tahun 2019 ini tersajikan artikel-artikel yang membahas permasalahan yang masuk dalam kategori permasalahan global-lokal pada umumnya. Meskipun tidak menggunakan pendekatan khusus global-lokal, artikel-artikel itu cukup untuk mengingat kembali ungkapan “*Think globally and act locally*” dan “*Think locally and act globally*”, terutama dalam konteks Hubungan Internasional. Seperti permasalahan kesehatan perempuan di Filipina, permasalahan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia, permasalahan lingkungan pascabencana di Filipina yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), permasalahan resistensi Freedom Battalion (IFB) terhadap ISIS di Suriah, dan permasalahan yang berkaitan dengan konflik wilayah dan dilema keamanan di Laut Cina Selatan.

Artikel pertama berjudul “*Inaccessible Right: The Effect of the Implementation of Reproductive Health Law to the Women of Calbayog City*” ditulis oleh Addyssa M. Lentejas. Artikel ini membahas mengenai permasalahan kesehatan perempuan di wilayah lokal Filipina yang penanggulangannya telah diagendakan oleh PBB dalam program SDGs. Artikel ini sepakat bahwa perempuan sejatinya memiliki semua hak membuat keputusan sendiri atas tubuhnya dan memiliki akses informasi mengenai kesehatan reproduksi dan cara merawatnya serta mengenai UU Kesehatan Reproduksi yang diterapkan. Namun hal ini tidak berlaku bagi perempuan di daerah terpencil di Filipina, seperti di kota Calbayog, meskipun terdapat lembaga yang bertanggung jawab terhadap mereka dalam menyediakan sumber daya dan pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan baik fisik maupun mental. Kekurangan layanan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi serta implementasi

yang buruk dari UU Kesehatan Reproduksi terhadap para perempuan di kota tersebut telah membuat mereka senantiasa bermasalah ketimbang para lelakinya dan mengindikasikan bahwa kesetaraan gender belum terpenuhi yang berkontribusi negatif dalam performa Filipina di dunia dalam menghadapi permasalahan lokal yang juga merupakan masalah global.

Artikel kedua ditulis oleh Yoga Suharman yang berjudul “*Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan*”. Fenomena yang dimunculkan adalah masalah keamanan nasional negara yang kemudian menjadi masalah kolektif anggota suatu organisasi regional yang kemudian menimbulkan dilema keamanan ekstra-regional. Dalam substansinya artikel ini menjelaskan dua aspek politik keamanan di Laut Cina Selatan. Pertama, peran kolektif ASEAN dalam usaha memelihara stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan dengan melihat pada aspek sistem keyakinan masing-masing negara yang berkepentingan. Kedua, konfigurasi kekuatan ekstra-regional dalam lingkup pengaruh pada kawasan yang dipersengketakan. Dengan berlatar belakang Laut Cina Selatan sebagai jantung geopolitik dan geoekonomi bagi negara-negara di Asia Tenggara yang menjadikan negara-negara di kawasan ini sangat bergantung pada stabilitas kawasan tersebut sebagai jalur pelayaran energi dan sumber produksi yang bernilai tinggi. Keadaan ini membuat Laut Cina Selatan menjadi medan persaingan geopolitik dan geoekonomi strategis yang menjurus menjadi sengketa tidak hanya bagi negara di sekitar kawasan seperti Taiwan dan kelompok negara penuntut yang tergabung dalam ASEAN, namun juga bagi negara besar seperti Cina, Jepang dan Amerika Serikat.

Bila ditinjau dari perspektif global-lokal, tindakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan di sekitar Laut Cina Selatan yang mengutamakan kepentingan nasional masing-masing dapat menimbulkan permasalahan bila kepentingan tersebut di atas kepentingan bersama dan jauh dari nilai kolektivisme negara-negara baik regional maupun global. Berfikir dalam lingkup yang lebih luas baik regional maupun global, permasalahan besar yang dihadapi oleh ASEAN khususnya adalah belum adanya norma, aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang mampu mengikat secara hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk yang tertuang dalam *Declaration of Conduct*. Kondisi ini memberi peluang bagi krisis Laut Cina Selatan yang berkelanjutan.

“Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia” merupakan judul artikel ketiga yang ditulis oleh Sara Gabriella. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi permasalahan nasional dan global memerlukan pemikiran dan tindakan berwawasan global-lokal atau lokal-global tercermin dalam pembahasan artikel ini. Artikel ini menganalisis bentuk upaya kerja sama Indonesia dan Interpol dalam pemberantasan salah satu kejahatan transnasional yaitu isu penyelundupan narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan. Upaya pihak Indonesia bersama interpol sebagai mitra berkesesuaian dengan cara kerja teori rezim internasional antara entitas-entitas yang memperhatikan aspek-aspek kepentingan negara, kekuatan politik, serta norma dan prinsip. Cara serupa kerja rezim internasional yang dipilih Indonesia terkait isu penyelundupan narkoba ini berpotensi membangun dan memengaruhi bentuk penanganan yang konsisten dan lebih “tertata” serta menjadi alasan untuk memperkuat kerja sama.

Artikel keempat berjudul *“Humanitarian Accountability in Post-Haiyan Response in the Philippines”*, oleh Ginbert Permejo Cuaton. Artikel ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat lokal di akar rumput yang secara kolektif bergerak sebagai organisasi non-pemerintah dalam menggantikan peran negara mengimplementasikan ide global tentang kemanusiaan.

Artikel ini membahas mengenai akuntabilitas organisasi non-pemerintah yang bertindak sebagai 'saluran pilihan' untuk menyediakan barang dan jasa penyelamatan hidup dan kemanusiaan. Dalam konteks pascabencana serangan supertopon Haiyan di Filipina pada November 2013, intervensi kemanusiaan organisasi non-pemerintah ini mengisi kesenjangan pada penyediaan layanan dan kebutuhan pascabencana bagi para korban bencana. Di tengah berbagai masalah dan kontroversi seputar bagian awal fase rehabilitasi, orang-orang Filipina menyatakan ketidaksetujuan yang ekstrem mengenai ketidakmampuan pemerintah dalam menangani bantuan dan melaksanakan proyek-proyek kemanusiaan di daerah-daerah yang terkena dampak Haiyan dan melihat organisasi non-pemerintah secara efektif telah menutup kesenjangan dari kegagalan pemerintah Filipina ini. Namun, reputasi organisasi non-pemerintah ini tidak bebas dari masalah akuntabilitas mereka kepada penerima manfaat dan masyarakat umum yang muncul kemudian.

Artikel terakhir ditulis oleh Falhan Hakiki yaitu “*Resistensi Terbuka International Freedom Battalion (IFB) Terhadap ISIS di Suriah*”. Artikel ini membahas mengenai aksi-aksi gerakan salah satu kelompok transnasional yang ada di dunia yang tergerak untuk melakukan aksi bersama dalam menentang kekuasaan yang semakin meluas dan merambah di suatu wilayah dan kawasan. Dapat dikatakan ini merupakan implementasi dari aksi-aksi lokal, yang mendapatkan dukungan transnasional untuk menentang pemikiran dan tindakan yang semakin mengglobal dalam memengaruhi secara dominan pemikiran dan tindakan-tindakan lokal yang tidak sejalan di manapun.

Artikel ini mendeskripsikan aksi-aksi gerakan resistensi International Freedom Battalion (IFB) terhadap ISIS di Suriah khususnya dan kawasan Timur Tengah pada umumnya. IFB terbentuk sebagai sebuah wadah penyatuan para *volunteers* berasal dari bermacam negara dan kelompok-kelompok perjuangan lainnya dalam melakukan resistensi terhadap ISIS. Tujuan IFB, yang terinspirasi dari kelompok perjuangan Brigade Internasional dalam perang saudara Spanyol 1936-1939, salah satunya adalah melawan nilai-nilai dan tindakan-tindakan fasisme ISIS dalam memerangi masyarakat atau kelompok lain yang tidak memiliki pemahaman dan jalan yang sama dengan ISIS. Kekuasaan dominan ISIS meliputi dominasi material, dominasi status, dan dominasi ideologi. Dominasi material lewat okupasi yang dilakukan ISIS dengan menduduki wilayah Suriah Utara. Dominasi status di wilayah Suriah yang dikuasai ISIS, khususnya Suriah Utara, adalah dengan menerapkan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh perangkat yang berada di kawasan kekuasaannya. Dominasi ideologi ISIS pada daerah kekuasaannya itu adalah dengan menerapkan nilai-nilai yang Islamis dan menjalankan syariat Islam secara radikal serta mengkampanyekan pendirian *Khilafah*. Sementara aksi resistensi IFB terhadap ketiga bentuk dominasi ISIS mengambil bentuk *action* dan *opposition* secara terbuka. Bentuk *action* dari tindakan resistensi IFB berupa serangkaian aksi militer yang dilancarkan pada kurun waktu 2015-2017. *Opposition* dari tindakan resistensi IFB meliputi perlawanan terhadap okupasi wilayah yang dilakukan ISIS, perlawanan terhadap cap *takfiri* ISIS, dan perlawanan terhadap ideologi fasisme gaya baru ISIS demi mempertahankan Revolusi Rojava.

Bersamaan dengan publikasi e-jurnal Intermestic Volume 3 Nomor 02 pada bulan Mei 2019 kali ini, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas

kesediaan empat penelaah sejawat atau mitra bestari (*peer reviewer*) lama dan baru, yaitu: Dr. R. Widya Setiabudi, S.IP., S.Si., M.T., M.Si. (Han), Drs. Abubakar Eby Hara, Ph.D., Dra. Baiq L.S.W. Wardhani, M.A., Ph.D., dan Nanto Sriyanto, S.IP. M.A. Dengan kepakaran masing-masing dalam ragam ilmu dan konsentrasi khususnya akan memperkuat kualitas, kredibilitas serta posisi dan arah jurnal ini.

Hormat kami,
Arry Bainus dan Junita Budi Rachman
Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi